

DAFTAR PUSTAKA

- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Purnomo, Bambang. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Ali, Zainuddin. 2013. *Sosiologi Hukum*, Palu: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabean*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suandi, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Laksana.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusomo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Tindak Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tumalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- J. Remellink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Yogyakarta: Sungging.
- Susilo. 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirdjono. 2008. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono & Soerjono, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Hanitijo, Ronny. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Joko Subagyo. 2004. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suryabrata, Sumandi. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suharismi Arikunto & Cepi Safiruddin Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

Jaya, Muhammad. 2006. *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma,

Su dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta*: Raja Grafindo Persada.

Putri, Ary, Dita, Nyoman. *Penegakan Hukum Terhadap Peredara Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, Jurnal Prefensi Hukum, Volume 3. Nomor 1, Januari 2020, hal.2

Erdianto. *Makelar kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 1, Agustus, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. Pengaruh Penegakan

Susanti. 2019. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok*, Kota Makasar: Universitas Hasanuddin.

J. Anglaina. 2019. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Universitas Negri Lampung.

Joel Andreas Purba. 2021. *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C. Kabupaten Indragiri*, Universitas Islam Indragiri.

Jusriati, Dian. 2018. *Apa Itu Barang Kerna Cukai*, Kabupaten Sumenep, Universitas Wiraraja.

Andrisman. Tri. 2013. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013

Abdullah, Fikry. 2020. *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai, Kota Tegal*: Universitas Panca Sakti.

Khamid. Abdul. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. Pasal 1 Ayat (3) Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah) 2000, Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. hal.33

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Pasal 58A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012 dan implementasi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai

Rizam adila syakurah, *Tinjauan Pustaka Rokok dan Peraturan Terkait Rokok*, <https://mabanget.wordpress.com/2013/02/01/tugas-ikm-rokok/>

<http://probolinggokab.go.id/kppbc-tmp-c-probolinggo-musnahkan-barang-hasil-operasi-gempur-rokok-ilegal/>

<http://m.merdeka.com/peristiwa/jutaan-batang-rokok-dan-barang-ilegal-di-probolinggo-dimusnahkan.html>

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>,

Visualisasi Data Kepedudukan, Kementrian Dalam Negeri 2022. www.dukcapil.kemendagri.go.id

Kota Probolinggo Dalam Angka 2019. www.probolinggokota.bps.go.id.